

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi dalam sistem keuangan saat ini sangat pesat, sehingga diperlukannya pengawasan sistem keuangan yang baik pada sektor jasa keuangan, tidak hanya pengawasan tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan sektor tersebut.¹

Secara umum terdapat tiga pilar pengawasan sistem keuangan yaitu *fiscal Authority*, *Monetary Authority*, dan *Financial System Stability Authority*. Dimana, Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal (pajak), dalam hal ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal. Bank sentral sebagai otoritas moneter yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang terkait dengan nilai tukar dan inflasi.²

Kemudian, otoritas stabilitas sistem keuangan sebagai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan *makroprudensial* dan *mikroprudensial* terhadap lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan

¹ Fahmi Firmansyah, *mengenal otoritas jasa keuangan*, (yogyakarta: juli 2020)

² Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta : OJK, 2016), hlm. 9

yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan lainnya.³

Seperti halnya, di Indonesia sistem pengawasan keuangan terdiri dari Kementerian Keuangan, dimana bertugas mengatur dan melaksanakan kebijakan fiskal, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas sistem moneter, dan Otoritas Jasa Keuangan mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan.⁴

Sebelumnya pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), dan badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI mengatur dan mengawasi sektor perbankan sedangkan Bapepam-LK mengatur dan mengawasi Pasar Modal dan Jasa keuangan lainnya.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang terintegrasi maupun independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam mengatur sistem regulasi melakukan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. OJK ini merupakan lembaga yang bukan

³Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan Mikroprudensial*, (Jakarta : OJK, 2016), hlm. 11

⁴Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan...*, hlm. 13

⁵Hesty D. Lestari, "Otoritas Jasa Keuangan : Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 3, 2012, h. 557

bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran (*fairness*).

Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang teratur, adil akuntabel dan transparan. Oleh sebab itu, OJK memiliki peran yang penting dalam menjaga daya saing dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.⁶

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, di persyaratkan pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang baru dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan independen yang dibentuk dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dan pasal tersebut, di bentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-

⁶Muhammad Fakhri Amir, "Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)," *Journal of Islamic Economic Law* Maret 5, no. 1(2020): 59–71.

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁷

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan system pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara Indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi peransuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan termasuk pasar modal.⁸

Independensi OJK ini sangat dijaga dan ini terlihat penegasannya pada UU RI No. 21 Bab II Pasal 2 ayat berbunyi OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Tujuan Independen OJK ini diperlukan agar kemampuan dalam mengatur dan mengawasi jalannya lembaga keuangan di Indonesia dapat dilakukan dengan baik dan tegas. Kerena kita bisa mencatat bagaimana banyak bank yang mengalami masalah karena disebabkan oleh lemahnya *control* dari lembaga terkait.

⁷ Mohamad Nasir, *OJK dan Pengawasan...*, hal. 2

⁸ Seli Agustini, "Pemahaman Masyarakat Kota Bengkulu Terhadap Fungsi Dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Dan Perlindungan Konsumen", 2019, hlm. 2

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan dan pengawasan terhadap bank. Salah satu peranan OJK terhadap sektor keuangan adalah peraturan dan pengawasan dalam kegiatan usaha di bidang perbankan. Wewenang OJK dalam Pasal 7 UU OJK adalah membuat peraturan dan melakukan pengawasan terhadap bank.⁹

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia.¹⁰

Namun, OJK ini belum dirasakan oleh banyak masyarakat, pasalnya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran OJK. Sehingga masyarakat sering menjadi sasaran penipuan masalah keuangan, seperti terjat dalam investasi yang tak berbadan hukum atau ilegal atau bahkan menjadi sasaran pinjaman seperti koperasi keliling (renternir), selain itu banyak juga masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan,

⁹Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Syariah Konvensional & Syariah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), hlm. 20

¹⁰Fikri Dikriansyah, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Ivestasi Ilegal Di Indonesia," *Biomass Chem Eng* 3, no. 2 (2018):

seperti perbankan, asuransi, pegadaian, dan pasar modal. Dan banyak dari masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, namun sangat banyak di kalangan masyarakat dari semua kalangan adalah penggunaan layanan Bank. Selama ini masyarakat yang menggunakan layanan jasa keuangan ini masih ada yang tidak paham kehadiran lembaga yang mengatur, mengawasi, bahkan melindungi kepentingan konsumen di lembaga jasa keuangan tersebut.

Dalam perkembangannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang otoritas jasa keuangan. Di desa kembang seri kecamatan pino raya kabupaten bengkulu selatan masih rendah sekali pemahaman masyarakat tentang OJK. Di kecamatan pino raya sudah ada lembaga keuangan yang pengaturan dan peangawasan seperti Bank BRI dan Bank Bengkulu. Karena masyarakat selalu berhubungan keuangan, simpan pinjam. Agar masyarakat tidak salah dalam mengambil keputusan dan tidak merasa dirugikan maka masyarakat harus mengetahui lembaga yang mengawasi dan melakukan perlindungan konsumen di sektor tersebut. Namun hal tersebut belum banyak masyarakat yang memahaminya.

Bedasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di desa kembang seri terhadap peran otoritas jasa keuangan masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui tentang OJK. Hasil wawancara kepada bapak

Halimin selaku kepala desa kembang seri , membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang tidak paham dengan OJK dan ada beberapa yang hanya sekedar tahu namun tidak mengetahui apa itu OJK.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti akan Mengangkat Permasalahan dalam penelitian ini yakni **“Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa keuangan (OJK)”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya untuk menjawab beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan dan juga untuk wilayah penelitian hanya di masyarakat Desa Kembang Seri saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan apa yang mejadi permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk membahas hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:

1. Untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Dapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian ini lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada sebelumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Desa kembang Seri Kecamatan Pino

Raya Kabupaten Bengkulu Selatan agar lebih memahami tentang Otoritas Jasa Keuangan

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi, Amin Hidayat, Berjudul “*Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan*”. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, tahun 2017. Penelitian ini Dalam penelitian ini membahas mengenai Peran OJK dalam meningkatkan literasi keuangan pada masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Literasi keuangan *financial literacy* dalam arti pemahaman terhadap keuangan, Literasi keuangan tidak akan sampai pada masyarakat bila tidak ada suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga dalam mensosialisasikan tentang literasi keuangan tersebut. Sosialisasi mengenai literasi keuangan di Indonesia dilakukan oleh OJK. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Data diperoleh dari wawancara penelitian seperti kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sedangkan dalam pengumpulan data

dengan observasi tidak langsung, wawancara tidak langsung, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Purwokerto.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis karena penelitian yang dilakukan oleh Amin Hidayat mengenai fungsi dan tugas OJK dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah OJK bukan masyarakat. Dan mengetahui upaya dari OJK wilayah Purwokerto dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan. Sedangkan, penelitian penulis yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat desa kembang seri terhadap peran otoritas jasa keuangan. Persamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian, karena penelitian Amin Hidayat sama dengan penelitian penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara observasi langsung dan tidak langsung, dokumentasi, dan analisis menggunakan deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.

¹¹Amin Hidayat, *“Peran Ojk (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto,”* 2017.

2. Skripsi, Zacky Nouval yang berjudul "*Pengawasan terhadap perbankan syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di kantor otoritas jasa keuangan daerah Istimewa Yogyakarta)*". Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. Hasil penelitian dari ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perbankan syariah di DIY Otoritas Jasa Keuangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu melakukan pengawasan perbankan syariah dengan ruang lingkup perbankan yang berkantor pusat di DIY saja dalam arti lain tidak semua perbankan yang berbasis syariah yang berada di DIY berada dalam pengawasan OJK DIY. Adapun bentuk pengawasannya yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif dengan tiga sistem yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan (Compliance Based Supervision /CBS), Pengawasan berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision/RBS) dan Pengawasan Terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas nya OJK DIY telah bekerja sedemikian rupa, tapi masih banyak menemukan permasalahan atau kendala baik dari internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu kendala personal SDM yang belum sepenuhnya memadai, masalah regulasi dll, adapun

kendala eksternal yaitu masih banyak pihak bank yang tidak taat dan patuh akan regulasi yang sudah ada, dalam arti lain masih belum adanya kesadaran dari pihak bank untuk mentaati peraturan main yang ada.¹²

Penelitian ini berbeda dengan penulis karena penelitian ini studi langsung pada OJK di Yogyakarta sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran OJK melalui observasi dan studi pustaka, karena menurut penulis masyarakat banyak masih tidak paham terhadap OJK di lembaga keuangan khusus. Maka dari itu penulis melakukan observasi langsung lapangan mengenai tingkat pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan penelitian ini sama dengan penulis, karena penulis menggunakan penelitian dengan metode kualitatif dimana data nya bersumber dari observasi lapangan, wawancara dan studi literatur dari sumber-sumber yang ada dan juga sumber berasal dari penelitian lapangan, dimana langsung melibatkan Masyarakat Desa.

3. Jurnal Nasional, Denia Maulani dan Vera Dwi Octavya, Yang berjudul "*Peran Otoritas Jasa*

¹²Nouval Zacky, "*Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi Di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta),*" Ekp 13, no. 3 (2015): 1576–80.

Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Konsumen”, Tahun 2021. Dalam penelitian ini dalam Kegiatan Lembaga Keuangan sektor Jasa Keuangan pada sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang dijadikan sebagai ukuran kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Maka, pemerintah membentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat perlindungan konsumen yang berupa pengaduan konsumen. Perlindungan Konsumen merupakan wadah bagi konsumen dan masyarakat sebagai tempat bertukar informasi beserta pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen terhadap lembaga keuangan khususnya pada sektor jasa keuangan atau perbankan.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis karena penelitian yang dilakukan oleh Denia Maulani dan Vera Dwi Octavya mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan

¹³Denia Maulani and Vera Dwi Octavya, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Konsumen,” *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 9, no. 1 (2021).

Konsumen untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Sedangkan penelitian penulis yang akan diteliti yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat desa kembang seri terhadap peran otoritas jasa keuangan. Persamaan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan observasi.

4. Jurnal Internasional, Reza Kurnia and John Welly, tahun 2015. Berjudul "*The Assessment Of Employee Engagement Level In A New Institution During Transition Period (Case Study: Otoritas Jasa Keuangan)*". Penelitian ini berhubungan dengan perusahaan dan karyawan harus dibangun untuk menciptakan dorongan bagi karyawan untuk bekerja lebih optimal. Keterlibatan karyawan dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan karena karyawan tidak hanya memikirkan sendiri, tetapi juga mereka berusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan tempat dia bekerja. Saat ini pegawai OJK sedang masa transisi atau bisa disebut juga sebagai pegawai tidak tetap.

Ketidakpastian karyawan sebagai tetap pegawai bisa menjadi sesuatu yang berisiko bagi OJK. Oleh karena itu, OJK harus menarik pegawai tidak tetap

yang berada dimasa transisi menjadi lebih terlibat dengan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui tingkat pegawai keterlibatan di OJK menggunakan model Aon Hewitt. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling dengan dibutuhkan total responden berjumlah 92 orang. Distribusi kuesioner ditujukan sesuai dengan ruang lingkupnya yaitu kepada pegawai OJK dari BI. Untuk melihat hubungan variabel bebas pada variabel terikat, digunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya faktor terdiri dari enam variabel sama dengan jumlah faktor sebelumnya. Keenam faktor ini memiliki pengaruh yang sangat kuat hubungannya dengan tingkat keterlibatan karyawan. Kemudian, ada hasil persamaan dari metode regresi yang digunakan.¹⁴

Penelitian ini sama dengan penelitian penulis karena membahas tentang OJK, tetapi penelitian yang dilakukan penulis meneliti Tingkat Pemahaman Masyarakat dan perbedaan perbedaan pada metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan perhitungan variabel-variabel yang menggunakan

¹⁴John Welly Kurnia, Resa, “*The Assessment of Employee Engagement Level in a New Institution During Transition Period (Case Study: Otoritas Jasa Keuangan)*,” *Journal of Business and Management* 4, no. 1 (2015): 218–28.

metode regresi, yang dimana faktor-faktor memiliki sebuah hubungan dengan tingkat karyawan, yang membuat penelitan ini sama dengan penelitian penulis adalah bahwa kajian dari penelitian ini sama, karena membahas mengenai OJK.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian ini digolongkan jenis penelitian lapangan (*field research*), karena penulis langsung datang ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat dengan cara wawancara langsung dengan masyarakat yang berada di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *Deskriptif Kualitatif*. penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *Deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dalam bentuk tindakan kebijakan

2. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari 12 Desember 2022 sampai dengan 12 Januari 2023.

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Peneliti memilih tempat penelitian di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dikarenakan masyarakat tidak paham tentang Otoritas Jasa Keuangan dan belum ada yang pernah melihat permasalahan ini di Desa Kembang Seri Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini ditentukan secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai informasi tertentu. Penentuan teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan yang bertujuan untuk bisa memberikan informasi yang dibutuhkan.

Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan dari penelitian ini adalah masyarakat desa kembang seri dengan jumlah populasi 872 orang. Responden yang

terpilih kemudian didatangi dan diwawancarai. Dengan responden yang dijadikan penelitian yaitu 15 narasumber diantaranya 6 orang prangkat dasa, 3 orang guru, 4 orang Swasta dan 2 Orang AgenBrilink. Alasan peneliti memilih 15 narasumber ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat desa kembang seri terhadap peran Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu memudahkan peneliti untuk melakukan proses wawancara dalam penelitian.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau berasal dari sumber data utama. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang bersangkutan yaitu masyarakat yang ditemukan di wilayah Desa Kembang Seri Kecamatan Pino raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan pedoman wawancara atau sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, maupun internet.

2) Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi kepada beberapa Masyarakat Desa Kembang Seri, observasi difokuskan pada tempat penelitian, dengan cara memperhatikan dan mengamati secara langsung lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan judul ini. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara, wawancara ini dilakukan secara langsung kepada Masyarakat di Desa Kembang Seri Kabupaten Pino Raya Kecamatan Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan ketika di lapangan pada saat wawancara adalah menggunakan kamera Smartphone untuk mendokumentasikan gambar atau foto. Kemudian, peneliti juga menggunakan sumber-sumber wawasan untuk meluruskan penelitian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, majalah, artikel, berita-berita, dan dokumen-dokumen lainnya yang dipercaya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep Miles dan Huberman dalam buku Sugiono yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga dikatakan sudah jenuh, aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion* data.¹⁵

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data adalah:¹⁶

¹⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 246

¹⁶ Sugiono, *Metode...*, h. 247

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data Reduction berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display atau penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Data Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh buktibukti yang valid konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kredibel.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi atas lima bab yang terbagi atas sub bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I :

Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :

Kajian Teori terdiri dari : Pengertian Pemahaman, Tingkat Pemahaman, Bentuk-Bentuk Pemahaman, Faktor faktor yang mempengaruhi Pemahaman, Pengertian Masyarakat, Macam-Macam Masyarakat, Ciri-Ciri Masyarakat, Faktor-faktor Yang Mendorong pemahaman, Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sejarah Otoritas Jasa Keuangan, Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III :

Gambaran Umum Objek Penelitian terdiri dari : Singkat Sejarah Desa Kembang Seri, Letak dan Batas Desa Kembang Seri, Visi dan Misi Desa Kembang Seri, Keadaan Penduduk, dan Struktur Desa kembang Seri.

BAB IV :

Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari : Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan Untuk Memahami Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BAB V :

Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran: Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Kembang Seri Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan.

